



UNIVERSITAS DR. SOETOMO
Cerdas | Berbudi | Berprestasi

Nur S



PROCEEDING SEMINAR NASIONAL

LOCAL WISDOM ENTREPRENEURSHIP
Surabaya, 24 Oktober 2012



Ketua Penyunting
Dr. Ir. Suyanto, MM

seminas.unitomo.ac.id

**SEMINAR NASIONAL DAN PROCEEDING UNIVERSITAS DR
SOETOMO SURABAYA 2012**

“LOCAL WISDOM ENTREPRENEURSHIP”.

@ Hak cipta dilindungi Undang-undang

Diterbitkan pertama oleh:
Universitas Dr. Soetomo Surabaya

ISBN 978-602-17013-0-0



**Sanksi Pelanggaran Pasal 22
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta:**

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat(1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah).

DAFTAR ISI

NO.	JUDUL NASKAH	PENULIS/INSTANSI/BIDANG KAJIAN	HAL
1.	REKONSTRUKSI PENILAIAN KINERJA KOPERASI DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN <i>BALANCED SCORECARD</i>	FRANSISKUS RANDA & RONALD RANDA PAKIDING FE UNIV. ATMAJAYA MAKASSAR	1
	MENCIPTAKAN DAN MENGEMBANGKAN JIWA ENTREPRENEUR	DR. LIOSTEN RIANNA ROOSIDA ULLY TAMPUBOLON, MM Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Dr Soetomo Surabaya Liostenully@yahoo.com	33
2.	MENGAGAS KEMBALI PRINSIP <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> (SEBUAH REFLEKSI MELALUI PEMBACAAN DEKONSTRUKTIF)	NUR SAYIDAH (Universitas Dr. Soetomo Surabaya)	41
3.	MEMBANGUN CAPTIVE MARKET BERKELANJUTAN PADA UKM PETANI BUNGA KRISAN DI KABUPATEN PASURUAN	SUKESI Universitas Dr Soetomo Surabaya (Bidang Kajian : Pemasaran)	53
4.	3D VISUALIZATION OF EARTH SURFACE	CAHYO CRYSDIAN Jurusan Teknik Informatika – Fakultas Sains Dan Teknologi Univ Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Email: Crysdian@yahoo.com	71
5.	PERANAN PEMBIAYAAN KREATIF DALAM MENUNJANG INDUSTRI KREATIF YANG BERBASISKAN KEARIFAN LOKAL DALAM RANGKA MENINGKATKAN JUMLAH WIRAUSAHAWAN KREATIF DEMI KEMAJUAN PEREKONOMIAN NASIONAL	HENDRIK SUHENDRI, SE, MSA DAN RISNANINGSIH, SE, MSA (HUMBIS), Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang	78

- | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6 | INVENTARISASI KEARIFAN LOKAL (LOCAL WISDOMS DI KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN PELUANG PENGEMBANGANNYA | DR. IR. WAHUDI
EMAIL:
ISANAUTAMA@YAHOO.COM ,
Fakultas Pertanian Jurusan
Kehutanan Univ. Palangkaraya | 91 |
| 7. | BERBAGI INFORMASI DAN KUALITAS INFORMASI PADA IMPLEMENTASI SUPPLY CHAIN MANAGEMENT TERHADAP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN | DEWI ASTUTI
Manajemen Keuangan
Universitas Kristen Petra,
Surabaya, Email :
Dewi@Peter.Petra.Ac.Id ,
Sautma Ronni Basana,
Sautma@Peter.Petra.Ac.Id ,
Zeplin Jiwa Husada Tarigan | 101 |
| 8 | UPAYA PENGGALIAN KEARIF-AN LOKAL UNTUK MENCETAK MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERJIWA KEWIRAUSA-HAAN DALAM RANGKA MENUMBUHKEMBANGKAN UKM DAN KOPERASI" | DRS. EDDY M. SUTANTO,
M.SC.
Eddy.M.Sutanto@Gmail.Com | 112 |
| 9 | DETERMINANTS OF CUSTOMER SATISFACTION OF SOUR SALLY FROZEN YOGURT IN SURABAYA | AMELIA,
SENY CHANDRA,
Management Department
Universitas Pelita Harapan
Surabaya, | 120 |
| 10. | PENGEMBANGAN JIWA DAN KECERDASAN WIRAUSAHA | P.JULIUS F. NAGEL
Email:
Juliusnagel@Ymail.Com , Ninuk
Muljani, Email:
Ninuk2011@Yahoo.Co.Id ,
Lecturer Of Faculty
Business Widya Mandala Cathol
ic University Surabaya | 131 |
| 11. | DAYA SAING DAERAH TUJUAN WISATA (STUDI KASUS RENDAHNYA DAYA SAING TAMAN WISATA ALAM KAWAH IJEN BANYUWANGI) | DR. SLAMET RIYADI, MM,
MP
Fakultas Ekonomi Universitas
Dr Soetomo | 141 |

12	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM STABILITAS POLITIK YANG DEMOKRATIS	REDI PANUJU Ketua Prodi Magister Ilmu Komunikasi Pascasarjana Universitas Dr. Soetomo Surabaya	161
13	UPAYA PENGGALIAN <i>LOCAL WISDOM</i> BERWAWASAN LINGKUNGAN PADA BISNIS PEREMPUAN PEDESAAN DENGAN JIWA <i>ENTREPRENEURSHIP</i> DALAM RANGKA MENUMBUHKEMBANGKAN KOPERASI HIJAU : KAJIAN DI NEGARA ASIA-PASIFIK	SRI MULJANINGSIH DJUMILAH HADIWIDJOJO² Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya : Ningsih2006@Yahoo.Com	185
14	PENGARUH KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN KARIER TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI DINAS TATA BANGUNAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN BOGOR	I GEDE ADIPUTRA Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta, Email: W_Wigra@Yahoo.Com	199
15	MODEL <i>COMMUNITY DEVELOPMENT</i> DALAM POLA <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> UNTUK MENINGKATKAN KINERJA UKM	GENDUT SUKARNO DWI SUHARTINI LIA NIRAWATI Fe Upn "Veteran" Jawa Timur	212
16	PEMBANGUNANEKONOMI MASYARAKAT MELALUI KJKS (KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH) BERBASIS KEARIFAN LOKAL	WIWIEK HARWIKI Universitas Dr. Soetomo Surabaya)	227
17	STRATEGI BERSAING LEMBAGA PENDIDIKAN BERDASARKAN KUALITAS LAYANAN, CITRA INSTITUSI DAN NILAI-NILAI KEISLAMAN KAITANNYA DENGAN KEPUASAN PELANGGAN (STUDIEMPIRISPADAPENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN TINGGI LEMBAGA PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH DI KABUPATEN JEMBER)	NURUL QOMARIAH Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember Qomariahn66@Yahoo.Com	240

18	STUDI EXPERIMENTAL PERILAKU INELASTIK ELEMEN BALOK BETON BERTULANG DENGAN PENULANGAN BAJA LUNAK DAN BAJA MUTU TINGGI AKIBAT BEBAN SIKLIK	K.BUDI HASTONO, ST., MT Dosen Teknik Sipil Universitas Dr. Soetomo Surabaya Email : Budihastono@Gmail.Com	251
19	PENGEMBANGAN PENATAAN ASOSIASI USAHA LOKAL NON KORPORATIS PRODUK MAKANAN OLAHAN GUNA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN URBAN COMMUNITY	FEDIANTY AUGUSTINAH, DRA, MM Fakultas Ilmu Administrasi- Jurusan Administrasi Bisnis Universitas Dr. Soetomo Surabaya Email : Fedi_August@Yahoo.Co.Id Fediaugust@Gmail	265
20	PENGARUH PENGGUNAN LIMBAH PECAHAN <i>PAVING</i> SEBAGAI ALTERNATIF PENGGANTI BAHAN AGREGAT KASAR TERHADAP KUAT TEKAN BETON	SAFRIN ZURAIHAH, ST., MT Dosen Teknik Sipil Universitas Dr. Soetomo Surabaya	268
21	MODEL KEHANDALAN UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN	WAJOEDI, IR, MT Dosen Teknik Sipil Universitas Dr. Soetomo Surabaya	280
22	<i>ACCOUNTING ACTIVE LEARNING: SEBUAH ALTERNATIF METODE PENGAJARAN AKUNTANSI UNTUK PENDIDIKAN BERBASIS ENTREPRENEURSHIP.</i>	WIRAWAN ED RADIANTO Program Studi Akuntansi Universitas Ciputra	293
23	KOPERASI SEBAGAI PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN BERDASARKAN HUKUM INDONESIA	WAHYU PRAWESTHI Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya	302
24	IMBALAN KERJA YANG BER- <i>LOCAL WISDOM</i> (SEBUAH USAHA MEMBANGUN KONSEP PENGUPAHAN YANG BERKEADILAN DI INDONESIA)	NURHAYATI Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Dr Soetomo Surabaya Nurhayatisofian@Gmai.Com	314

M	ANALISIS PEMANFAATAN FACEBOOK SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI PEMASARAN PRODUK UMKM KABUPATEN JOMBANG	ZAINAL MUTTAQIN magister Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Soetomo Surabaya program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang	325
M	PERGESERAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOCAL DAN FENOMENA EKONOMI LIBIDO SEBAGAI AKIBAT RENDAHNYA KUALITAS PEREMPUAN	DR. SRI WARJIYATI, SH.,MH	338
M	PENGAJIAN STOK SUMBERDAYA IKAN LAYUR DI PERAIRAN SELATAN JAWA TIMUR STOCK ASSESSMENT OF HAIR TAIL FISH IN THE SOUTH WATER EAST JAVA	YUSRUDIN	355
M	PENINGKATAN KAPASITAS SDM PETAMBAK GARAM MELALUI PELATIHAN TEKNOLOGI SISTEM TERPAL PADA PRODUKSI GARAM RAKYAT DI KABUPATEN LAMONGAN	INDRA WIRAWAN	367
M	PERENCANAAN PRODUKSI PAVING	BENNY SETIAWAN MUTIATUL FITRIYAH CHRISTIAN ABED	379
M	KONTRIBUSI LOCAL WISDOM UNTUK KEMAKMURAN BERSAMA RAKYAT MELALUI KOPERASI	MURPIN JOSUA SEMBIRING Murphy_Josua@Yahoo.Com	391

MENGGAGAS KEMBALI PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

(Sebuah Refleksi Melalui Pembacaan Dekonstruktif)

Nur Sayidah

Universitas Dr. Soetomo Surabaya)

nsayidah@yahoo.co.id

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk melakukan pembacaan atas teks prinsip *good corporate governance* dengan menggunakan pembacaan dekonstruktif Derrida atas teks. Prinsip *good corporate governance* di Indonesia seperti tertuang dalam pedoman *Good Corporate Governance Indonesia* yang dirancang oleh Komite Nasional *Good Corporate Governance* terdiri dari lima azas mencakup transparansi, akuntabilitas, integritas, independensi dan kewajaran di sektor publik. Pembacaan dekonstruktif Derrida dipakai sebagai alat untuk menganalisis dan mengkritik model ini. Melalui analisis, peneliti membuat dekonstruksi prinsip yang mencakup tiga aspek yaitu kejujuran, akuntabilitas suci dan integritas.

Kata-kata kunci: prinsip, *good corporate governance*, dekonstruksi

1. PENDAHULUAN

Skandal keuangan yang tak kunjung padam menghentak kita untuk mempertanyakan kembali *good corporate governance* (GCG) yang telah diterapkan selama ini. Diawali dengan stock market crash pada tahun 1929 yang kemudian diikuti beberapa kasus lain

yang tidak kalah menghebohkan. Kasus-kasus Enron, Worldcom Xerox, Global Crossing, Adelphia Communication, Merck dan Arthur Anderson adalah contoh dari skandal di tingkat internasional. Penyebab terjadinya kasus-kasus ini bukan hanya manipulasi laporan keuangan, tetapi skandal multidimensi yang melibatkan politisi dan pemimpin terkemuka Amerika Serikat. Banyak politisi di Senat Amerika yang menerima kucuran dana politik dari Enron. Namun inilah ciri dari sistem kapitalisme. Skandal Enron menguntungkan segelintir orang yang oportunistik yaitu pemegang saham mayoritas, direksi, komite audit dan manajer kunci, seraya mengorbankan ribuan karyawan, dana pensiun perusahaan, pemodal publik dan kreditur (Kelana Jaya, 2002).

Di Indonesia skandal keuangan hampir terjadi sepanjang waktu. Skandal yang terjadi akhir-akhir ini adalah skandal Adaro, Bank Century dan markus pajak. Adaro telah melakukan *transfer pricing* dengan menjual batu bara kepada salah satu perusahaan terafiliasi dengan harga rendah. Pendapatan yang dilaporkan tentu saja jauh lebih kecil dari yang seharusnya. Kerugian yang diderita negara mencapai milyaran rupiah. Kasus bank Century merupakan salah satu kasus skandal keuangan yang sampai saat ini masih belum terselesaikan. Bank Century memperoleh dana talangan dari negara dalam jumlah besar, atas dasar alasan pengaruh sistemik. Diperkirakan

bank Century telah melakukan manipulasi keuangan. Belum reda kasus bank Century, muncul kasus yang tidak kalah besarnya. Makelar kasus perpajakan telah terjadi di Jakarta dan di Surabaya. Tidak hanya di dua kota besar tersebut, kemungkinan besar kasus ini ada di setiap kota di Indonesia. Kasus ini telah menyeret beberapa nama pegawai pajak, yang paling menghebohkan adalah Gayus Tambunan. Perusahaan yang pernah ditangani Gayus diantaranya adalah sejumlah perusahaan besar. Di samping itu beberapa nama penegak hukum juga tersangkut. Ada yang berasal dari institusi kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Semuanya ini melibatkan manipulasi keuangan.

Ada pertanyaan besar terkait dengan kondisi ini. Ada apa dengan GCG nya? Kalau semua perusahaan dan instansi sudah menerapkan GCG, bukankah hal ini tidak akan terjadi. Apakah ada yang salah dengan konsep GCG atau faktor manusia yang mengimplementasikannya. Apakah memang benar apa yang dikatakan Soesastro (2002) seperti dikutip dari Rusdiyanto (2002)? Sebenarnya di Indonesia saat ini sudah tidak ada pemerintahan lagi. Kondisi sekarang ini akibat ketidakjelasan dan ketiadaan *vision, leadership, government, sense of urgency* dan *reform*. Untuk menciptakan GCG tampaknya harus dilakukan melalui suatu proses transformasi internal organisasi yang memfokuskan pergeseran secara fundamental pada *people management*, nilai-nilai, pola kerja, budaya organisasi dan pola pikir (*mind set*). Persaingan yang tajam, perubahan teknologi yang cepat, perubahan lingkungan yang radikal terjadi hampir pada semua aspek kehidupan organisasi dan masyarakat.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dipandang perlu untuk menelaah kembali konsep GCG yang selama ini kita pakai. Bagaimana cara menelaahnya dan seperti apa hasilnya? Artikel ini berusaha melakukannya dengan pembacaan atas teks prinsip GCG dengan menggunakan filsafat dekonstruktif Derrida.

C. PEMBAHASAN

1. *Good Corporate Governance*

Corporate Governance bisa diibaratkan sebagai salah satu pilar yang menopang berdirinya sebuah bangunan. Kokohnya pilar menentukan kekuatan dari bangunan yang bersangkutan. Kokohnya pilar tergantung dari jenis dan kualitas bahan yang dipakai. Prinsip *corporate governance* menurut OECD adalah perlindungan terhadap hak pemegang saham, perlakuan yang sama diantara pemegang saham, pengakuan hak para stakeholder sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dan dengan stakeholder dalam menciptakan kemakmuran, lapangan kerja dan kelangsungan perusahaan, keterbukaan, serta pertanggungjawaban dewan komisaris dan dewan direksi.

Hakikat *corporate governance* dapat ditelusuri melalui dua sisi, yaitu dimensi teoritis-akademis dan praktik-historis (Tim BPKP, 2003). Berdasarkan dimensi teoritis-akademis *corporate governance* muncul dari konsep awal adanya pemisahan antara *financial provider* (pemegang saham) dan manajemen. Konsep ini melahirkan teori keagenan seperti yang dikemukakan oleh

Jensen and Meckling (1976). Masalah keagenan timbul karena perbedaan kepentingan dan asimetri informasi antara pemegang saham dan manajemen serta pihak-pihak lain yang berkepentingan, serta ketidakmampuan menulis kontrak yang lengkap untuk seluruh agen/kelompok (Farr, 1995). Asimetri informasi menciptakan masalah bahaya moral (*moral hazard*) ketika manager mempunyai insentif untuk mengejar kepentingannya sendiri atas biaya pemegang saham. Asimetri informasi juga menciptakan masalah *adverse selection* ketika investor tidak dapat melihat nilai ekonomi perusahaan yang benar. Informasi tidak sempurna mengenai kualitas manajemen dan nilai ekonomi perusahaan menghasilkan risiko keagenan lebih besar yang dibebankan pada pemegang saham. Investor rasional meminta premium karena menanggung risiko keagenan, yang secara efektif meningkatkan biaya modal perusahaan (Asbahbaugh, 2004).

Terminologi *corporate governance* muncul sebagai alat, mekanisme dan struktur yang dipakai untuk mengecek perilaku managerial yang *self-serving* menguntungkan diri sendiri (John dan Senbet, 1998), membatasi perilaku *opportunistic* manager, memperbaiki kualitas informasi perusahaan (Asbahbaugh, 2004) dan menata hubungan antara semua pihak agar kepentingannya dapat diakomodasi secara seimbang. (Tim BPKP, 2005). Intraksi kepentingan yang tertata dalam suatu perusahaan juga memerlukan minat, kepercayaan, integritas upaya yang sungguh-sungguh dan kemauan dari seluruh penyelenggara perusahaan. Tujuan mengecek perilaku *self-serving* adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Alat yang digunakan untuk

mengurangi perilaku *self-serving* dan memperbaiki akuntabilitas tidak dapat efisien, jika alat tersebut menghambat perbaikan kinerja perusahaan.

Berdasarkan dimensi praktis-historis, berbagai peristiwa yang dialami dunia bisnis baik di luar negeri maupun di dalam negeri telah mendorong praktik *corporate governance* yang baik. Peristiwa tersebut adalah *stock market crash* pada tahun 1929 di Amerika Serikat, krisis keuangan Saving & Loan, skandal Bank of Credit and Commerce International, demokratisasi di berbagai negara dan krisis di Asia pada awal tahun 1997.

Keberhasilan dari praktik *corporate governance* perusahaan publik tidak terlepas dari adanya sebuah peraturan. Ada tiga tantangan fundamental yang saat ini dihadapi oleh pembuat peraturan publik (Coglianese dkk., 2004). Pertama adalah siapa yang seharusnya membuat peraturan, pemerintah atau *self-regulation* seperti NYSE, NASD atau BEI. Tantangan kedua adalah bagaimana mengaturnya. Pembuat peraturan menghadapi dua pilihan yaitu membuat prinsip atau peraturan *corporate governance*. Tantangan ketiga adalah bagaimana caranya agar prinsip atau peraturan tersebut dilaksanakan. Semua pilihan ada kelebihan dan kekurangannya. Analisis yang lebih mendalam perlu dilakukan untuk memilih berbagai alternatif tersebut agar penerapan *corporate governance* dapat mencapai tujuannya.

Berbeda dengan *corporate governance*, *good corporate governance* (GCG) merupakan praktek terbaik yang biasa dilakukan oleh suatu perusahaan yang berhasil yang mengacu pada bauran antara alat, mekanisme dan struktur yang menyediakan kontrol dan akuntabilitas yang

dapat meningkatkan *economic enterprises* dan kinerja perusahaan (Tim BPKP, 2003) serta mendorong perusahaan melakukan penciptaan nilai yang diproksi dengan kinerja masa depan (Kelley dkk.). Praktek terbaik ini mencakup praktik bisnis, aturan main, struktur proses dan prinsip yang dimiliki. GCG merupakan syarat bagi perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan bagi investor di pasar modal. Perusahaan dengan *corporate governance* yang baik akan dapat meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham. Hal ini karena visi, misi dan strategi perusahaan dinyatakan secara jelas, nilai-nilai perusahaan serta kode etik disusun untuk memastikan adanya kepatuhan seluruh jajaran perusahaan, terdapat kebijakan untuk menghindari benturan kepentingan dan transaksi dengan pihak ketiga yang tidak tepat, risiko perusahaan dikelola dengan baik dan terdapat sistem pengendalian dan monitoring yang baik (PriceWaterhouse Coopers, 2000). Penerapan GCG di PT. Adhi Karya membuktikan hal tersebut. Dalam periode satu tahun pencatatan di bursa, kekayaan pemegang sahamnya naik sampai 613%. Angka ini jauh lebih tinggi daripada pencapaian return yang didapat dari pasar secara keseluruhan. Secara rata-rata saham-saham di Bursa Efek Jakarta membukukan return sebesar 56% (Siauw Hong, 2005).

2. CGG dan Skandal Keuangan

Penerapan *good corporate governance* (GCG) dapat didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan. Dorongan dari etika (*ethical driven*) datang dari kesadaran individu-individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup

perusahaan, kepentingan *stakeholders*, dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat. Di sisi lain, dorongan dari peraturan (*regulatory driven*) "memaksa" perusahaan untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua pendekatan ini memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing dan seyogyanya saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang seha

Berulangnya skandal keuangan menunjukkan adanya celah dalam peraturan atau kebijakan yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi sebenarnya ada isu yang lebih fundamental, yaitu masalah kesadaran moral dan keTuhanan. Bagaimanapun ketatnya peraturan apabila tidak didasari dengan moral yang baik dan kesadaran akan tanggung jawab kepada Tuhan dalam diri manusianya, peraturan tinggallah sebuah peraturan. Tanpa makna. Ditambah lagi jika peraturan atau kebijakan dibentuk hanya berdasarkan aspek rasionalitas saja. Model *corporate governance* dibentuk berdasarkan *rational-choice theory*. Teori ini mengasumsikan bahwa individu merupakan orang yang memaksimalkan utilitas atas dasar kepentingan sendiri, mempunyai well-defined dan preferensi yang stabil dan konsisten. Pilihan atas berbagai alternatif dilakukan dengan menggunakan rumus diskonto. Alternatif dengan nilai *expected* yang tertinggi akan dipilih (Marnet, 2005).

Apabila setiap individu berperilaku seperti itu, maka akan ada konflik kepentingan dalam suatu organisasi. Teori keagenan menunjukkan bahwa konflik dapat dikurangi dengan mekanisme kontrol yang merupakan salah satu aspek dalam model *corporate governance* konvensional.

Model seperti ini banyak dikritik karena menyederhanakan terutama terkait dengan *judgement* dan *choice behaviour*. Riset psikologi kognitif dan perilaku dengan menggunakan konsep *bounded rationality* menunjukkan *judgement*, pengambilan keputusan dan perilaku bukan saja subyek dari *logical reasoning*, tetapi juga berbagai *heuristic*, dan bias kognitif. Bias kognitif ini mungkin mempengaruhi faktor dan tekanan yang mendalam terhadap kesesuaian dengan kelompok atau otoritas.

Corporate governance sering dikaitkan dengan praktek kekuasaan (*power*) dalam perusahaan perseroan terbatas. Satu saham satu suara adalah aturan hukum yang tidak saja berlaku pada saat *equalitarian* maupun *unequalitarian* tetapi juga pada penggunaan sistem akuntansi. *Equalitarian* karena kecuali *outside*, semua saham mempunyai bobot sama. *Unequalitarian* karena jika seseorang memiliki prosentase modal yang cukup, diajamin dapat bersuara untuk kepentingan dirinya sendiri dan lalu membuat keputusan untuk pihak lain. Kalau begitu sistem akuntansi tidak menggunakan postulat *netralitas* dan tidak mampu memberi informasi yang "true dan fair" (Pesqueux, 2005). model *corporate governance* konvensional dirumuskan dengan menggunakan ideologi superioritas dari *bourgeois* (pemodal). *Corporate governance* ditujukan untuk melindungi kepentingan pihak yang dominan dengan fokus perhatian pada konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer (Marnet, 2005).

Meningkatnya tekanan pemegang saham adalah salah satu faktor perubahan paling penting dalam profesi akuntan akhir-akhir ini. Penelitian Lambert dan Sponem (2005) menunjukkan bahwa tekanan pemegang

saham yang semakin besar menyebabkan keenderungan manajemen untuk melakukan manipulasi laba. Model *corporate governance* telah mendorong tumbuhnya perilaku semacam ini. Manipulasi laba digunakan sebagai alat manajemen untuk memperoleh legitimasi yang lebih luas dan/atau untuk mengadopsi apa yang mereka klaim sebagai perilaku etis. Hasil ini sangat jauh berbeda dari hipotesis oportunistik yang didukung oleh teori akuntansi positif.

3. Prinsip GCG di Indonesia

Berdasarkan pedoman umum Good Corporate Governance di Indonesia 2006 yang dirancang oleh KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance), setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Berikut ini adalah penjelasan masing-masing asas.

1. Transparansi (*Transparency*)

Prinsip Dasar

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh

pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

1.1. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.

1.2. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

1.3. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

1.4. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip Dasar

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas

merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

2.1. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan.

2.2. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.

2.3. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.

2.4. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).

2.5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Prinsip Dasar

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

3.1. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*).

5.2. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

4. Independensi (*Independency*)

Prinsip Dasar

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

4.1. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.

4.2. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Prinsip Dasar

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

5.1. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan

untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.

5.2. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

5.3. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

4. Pemahaman atas Filsafat Dekonstruksi Derrida

Dekonstruksi bukan metode tertentu atau program sistematis, melainkan cara membaca teks yang menunjukkan pengaruh dan ketergelincirannya: detail-detail kecil yang terlampaui atau menghilang yang mensugestikan pandangan lain dan tafsiran yang mungkin. Teks adalah tulisan atau sistem pemikiran atau apapun namanya yang berupaya membakukan makna, memberi tafsiran tunggal terhadap realitas, atau menghadirkan satu model pembacaan atas segala sesuatu. Menurut Derrida dekonstruksi merupakan strategi pembacaan teks; atau strategi tekstual yang hanya bisa diterapkan langsung jika kita membaca teks. Pihak yang berusaha memberi definisi "dekonstruksi" justru orang lain yang telah mengamati/mempelajari "strategi pembacaan" teks yang dilakukan Derrida (Riduwan, 2009).

Dekonstruksi berarti menggoyang, menjungkirbalikkan, mencemaskan, tetapi hanya mengobrak abrik dengan tujuan memberi peluang membangun hal-hal baru dan menemukan makna baru serta membuka pemikiran yang tertutup. Dekonstruksi pada dasarnya pertanyaan "apakah esensi (dari)...?" (O'Donnell, 2003). Dekonstruksi merupakan suatu pembacaan ganda, yang menggambarkan cara-cara dimana jenis-jenis dalam teks yang dianalisisnya mempersoalkan dasar teori. Dekonstruksi menggunakan sistem dari konsep yang ada di dalamnya yang mana teks berfungsi menghasilkan perintah seperti *differance* serta *suplemen* (Sturrock, 2004).

Menurut Al-Fayadl (2005) pembacaan dekonstruktif mengarah pada hermeneutika radikal sedangkan pembacaan biasa mengarah pada hermeneutika tradisional (Riduwan, 2009). Hermeneutika tradisional mencari makna sebenarnya dari teks, kadang-kadang berusaha menemukan makna yang lebih benar, atau minimal berharap akan memperoleh makna di kemudian hari. Hermeneutika dekonstruktif menyajikan tafsir akan teks dan realitas, tetapi tidak berpretensi menjadikan tafsir itu sebagai satu-satunya penjelas/pemikir otoritas yang sepenuhnya menguasai apa yang dihadapinya. Pembacaan dekonstruktif bukan melihat teks dari struktur yang membentuknya tetapi menemukan kekuatan teks yang diselubungi, direpresi, dan dimanipulasi oleh logika formal yang menjadi perandaian teks.

Langkah Mendekonstruksi Teks

Dekonstruksi Derrida terhadap teks dilakukan dengan apa yang diistilahkan pembacaan kritis dan pembacaan dekonstruktif. Rodolphe Gasche mencoba

mensistimasi tiga langkah dekonstruksi Derrida terhadap teks (Riduwan 2009).

1. Mengidentifikasi hirarki oposisi dalam teks, bisa dilihat dari yang mana peristilahan yang diistimewakan secara sistematis dan mana yang tidak.
2. Oposisi-oposisi itu ditulis dengan menunjukkan adanya saling ketergantungan diantara yang bertentangan tersebut, dengan kata lain keistimewaan masing-masing istilah yang beroposisi dibalik.
3. Memperkenalkan sebuah istilah atau gagasan baru yang ternyata tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori oposisi.

5. Pembacaan Dekonstruktif atas Teks Transparansi

Berdasarkan penjelasan atas prinsip transparansi, teks ini memberi keistimewaan pada konsep obyektivitas, informasi yang material dan relevan. Oposisi dari ketiganya adalah subyektifitas, tidak relevan dan tidak material. Memberi tempat istimewa pada konsep obyektifitas membawa konsekuensi bahwa informasi yang disediakan harus sesuai dengan bukti yang ada, mengabaikan nilai kebenaran dari bukti tersebut. Kebenaran tentu saja merupakan sesuatu yang subyektif karena tergantung pada keyakinan atau keimanan dan hati nurani.

Transparansi atas dasar obyektifitas bisa jadi digunakan untuk melegitimasi kedudukan atau mempertahankan status quo. Perusahaan yang sudah menyediakan informasi secara transparan dipandang sebagai perusahaan yang kredibel. Padahal belum tentu informasi yang disediakan itu benar. Kasus manipulasi laba merupakan

salah satu contoh konsekuensi dari obyektivitas. Laba yang dilaporkan memang sudah sesuai dengan bukti yang ada. Tetapi dibalik itu, bukti-bukti yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Misalnya faktur penjualannya dibuat tanggal mundur atau maju. Contoh lain misalkan ketika perusahaan membeli sebuah mesin seharga Rp. 100 juta, sudah termasuk biaya pengiriman dan pemasangan (bukti menunjukkan harganya memang Rp 100 juta) dengan prinsip transparansi maka Rp 100 juta inilah yang akan disajikan sebagai informasi harga perolehan mesin. Dengan dekonstruksi teks Derrida harga perolehan mesin 100 juta ini merupakan sebuah jejak. Ada jejak yang lain yang dihilangkan. Misalkan dibalik transaksi tersebut ada kejadian lain. Bagian pengadaan memperoleh *cash back* 10% (tentu saja 10% ini masuk ke kantong) 10% ini tidak dimasukkan dalam dokumen.

Nilai kebenaran yang merupakan faktor subyektivitas inilah yang dihilangkan dalam prinsip transparansi. Jika kita jujur dan percaya bahwa *cash back* adalah bukan milik kita, maka harga perolehan mesin kita informasikan sebesar 90 juta, dan uang 10 juta kita kembalikan ke perusahaan. Kemudian untuk materialitas dan relevansi, keduanya merupakan hal yang sangat subyektif. Tidak material dan tidak relevan bagi salah satu pihak belum tentu dipandang yang sama oleh pihak yang lain.

Oleh karena itu dalam perusahaan yang penting bukanlah prinsip transparansi, materialitas dan relevansi, tetapi kejujuran. Kejujuran manajemen perusahaan dalam tindakan dan kata-kata. Kejujuran berarti bertindak yang benar dan mengatakan yang benar. Benar yang dimaksud di sini adalah kebenaran universal. Jadi gagasan baru yang

diusulkan penulis adalah prinsip KEJUJURAN sebagai pengganti atas prinsip transparansi.

6. Pembacaan Dekonstruktif atas Teks Akuntabilitas dan Responsibilitas

Akuntabilitas menurut Perk (1993) berhubungan dengan pertanyaan: siapa (*who*) yang berakuntabel, kepada siapa (*to whom*), bagaimana (*how*) dan untuk apa (*for what*) berakuntabel. Menurut prinsip GCG, akuntabilitas dan responsibilitas dilakukan oleh perusahaan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara wajar dan transparan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Apabila kita mengacu pada pendapat Perk (1993), maka akuntabilitas dan responsibilitas harus bisa menjawab pertanyaan: siapa (*who*) yang berakuntabel, kepada siapa (*to whom*), bagaimana (*how*) dan untuk apa (*for what*) berakuntabel. Jawaban yang diberikan oleh KNKG adalah: yang berakuntabel (*who*) adalah perusahaan, kepada (*whom*) pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, masyarakat dan lingkungan, secara (*how*) wajar dan transparan dan untuk (*for what*) kinerjanya/ hasil dari pengelolaan perusahaan. Prinsip akuntabilitas dan responsibilitas GCG ini hanya dikaitkan dengan akuntabilitas dan responsibilitas horisontal yaitu kepada manusia dan lingkungan. Ada yang dioposisikan dalam hal ini, yaitu akuntabilitas vertikal kepada

pemilik alam semesta beserta seluruh isinya. Dialah Tuhan Yang Maha Esa.

Akuntabilitas horizontal dan vertikal ini oleh Triyuwono (2003) diistilahkan dengan akuntabilitas yang suci, yaitu akuntabilitas yang didasarkan pada nilai-nilai etika (etika syari'ah). Atau dengan kata lain, manajemen menyajikan "persembahan" yang suci kepada Tuhan, dan sebaliknya Tuhan menerima persembahan suci ini dengan ridho. Inilah sebetulnya bentuk "peribadatan" yang nyata dari manusia kepada Tuhannya (lihat QS. 51:56). Akuntabilitas suci merupakan spirit dari praktik bisnis yang dilakukan oleh manajemen, sehingga akan menghasilkan praktek *governance* yang lebih adil. Jadi penulis mengusulkan bahwa prinsip akuntabilitas perlu diganti dengan AKUNTABILITAS SUCI seperti yang pernah dimunculkan oleh Triyuwono (2003) ketika memformulasikan tujuan dasar laporan keuangan akuntansi syari'ah.

7. Pembacaan Dekonstruktif atas Teks Independen, Kewajaran dan Kesetaraan

Prinsip independensi dijelaskan sebagai bebas dari dominasi dan kepentingan pihak manapun. Prinsip ini memberi keistimewaan terhadap istilah bebas dari kepentingan yang berposisi dengan keberpihakan. Sebaliknya prinsip kewajaran dan kesetaraan yang berarti perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan, memberi keistimewaan terhadap istilah keberpihakan kepentingan yang berposisi dengan bebas

dari kepentingan. Jadikan kedua prinsip ini saling bertentangan atau berposisi.

Menurut penulis perusahaan memang tidaklah harus independen. Setiap aktivitas perusahaan harus memihak kepada kepentingan sosial (masyarakat) dan berdasarkan pada akhlak dan etika yang baik serta mengutamakan nilai bukan materi. Pemegang saham bukanlah yang memperoleh prioritas pertama untuk dipenuhi kepentingannya, di atas yang lain termasuk masyarakat. Sejatinya kesejahteraan bukan hanya milik seseorang atau keluarga tertentu, tetapi juga untuk orang lain secara menyeluruh (Agustianto, 2010). Pusat perjuangan manusia bukan menghitung dan menumpuk harta tetapi memufuk amal kebaikan yang berbuah manfaat kepada manusia dalam konteks kemaslahatan dunia (Harahap, 2010).

Dalam pengambilan keputusan yang penting bukanlah independensi, tetapi bagaimana keputusan yang dihasilkan itu berdampak pada keadilan. Oleh karena itu penulis mengusulkan prinsip KEADILAN sebagai pengganti ketiganya. Pengertian keadilan mencakup keseimbangan, persamaan dan nondiskriminasi, pemberian hak kepada pihak yang berhak serta keadilan Ilahi (Muthahhari, 2009, Shihab, 2007). Keseimbangan berarti bahwa setiap bagian dari perusahaan menuju tujuan yang sama secara proporsional. Persamaan berarti memandang semua individu secara sama rata, tanpa pembedaan dan pengutamaan. melaksanakan aktivitas harus didistribusikan diantara anggota masyarakat dan setiap anggota harus dimanfaatkan untuk suatu aktivitas secara proporsional, bukan proporsi yang setara. Pemberian hak kepada pihak yang berhak berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya,

memelihara hak-hak individu dan memberi hak kepada setiap obyek yang layak menerimanya. Keadilan Ilahi pada dasarnya rahmat dan kebaikan-Nya. Rahmat Tuhan YME akan diperoleh sejauh makhluk itu mampu meraihnya (Muthahhari, 2009, Shihab, 2007).

D. KESIMPULAN

Sebuah symbol (teks) tidak akan pernah dapat menggambarkan realitas secara utuh. Apa yang kita hadirkan dalam teks tidak akan pernah menunjukkan realitasnya (hakikat). Kebenaran akan selalu bersifat relatif. Seperti artikel inipun adalah teks yang kebenarannya relatif. Semua yang tertulis di sini benar dalam pandangan penulis. Pandangan orang lain tentu saja berbeda terutama karena pengaruh pengalaman dan latar belakang pendidikan serta kehidupan. Perbedaan pandangan/pembacaan akan terus selalu ada tanpa ada ujungnya. Seperti halnya bahwa petanda dan penanda merupakan sesuatu yang terpisah. Petanda dan penanda berada dalam ruang dan waktu yang berbeda. Ibarat sebuah matriks ada banyak kombinasi antara petanda dan penanda yang akan menghasilkan sesuatu yang baru.

Demikian juga untuk prinsip GCG, yang mana antara teks dan realitasnya berbeda. Banyak perusahaan yang sudah menerapkan GCG tetapi dalam realitasnya masih diwarnai dengan berbagai penyimpangan. Perbaikan atas penyimpangan ini dapat dilakukan dengan memperbaiki teks atau realitasnya. Teks yaitu prinsip GCG dapat diperbaiki dengan menggunakan pandangan yang lebih holistik seperti halnya yang penulis lakukan

dalam artikel ini melalui sebuah pembacaan dekonstruktif.

Pembacaan dekonstruktif menghasilkan perubahan makna dan istilah dalam prinsip GCG. Prinsip transparansi diberi istilah dan dimaknai sebagai kejujuran. Kejujuran dalam menyampaikan informasi dan kejujuran dalam bertindak. Apa yang dikatakan dengan tulisan sama dengan apa yang ditunjukkan dengan tindakan. Sementara untuk prinsip akuntabilitas dan responsibilitas diubah menjadi akuntabilitas suci. Akuntabilitas yang di dalamnya sudah mencakup responsibilitas tidak hanya ditujukan kepada manusia, tetapi juga kepada seluruh alam semesta dan Tuhan Yang Maha Esa. Terakhir, prinsip independen, kewajaran dan kesetaraan didekonstruksi menjadi prinsip keadilan.

Daftar Pustaka

- Ashbaugh, Hollis dkk, 2004, *Corporate Governance and Cost of Equity Capital*, www.ssrn.com, Desember.
- Coglianesi, Carry dkk., 2004, *The Role of Government in Corporate Governance*, Harvard University.
- Hart, O., 1995, Corporate Governance: Some Theory and Implication, *Economic Journal*, 105, Hal. 678-689.
- Kelana Jaya, Tun, 2002, *Dibalik Ambruknya Sistem Keuangan Global*, Majalah Al-wa'I No. 25 tahun III, September, hal 1-30.
- Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*.
- Lambert, Caroline dan Sponem Samuel, 2005, *Corporate governance and profit*

- manipulation: a French field study, *Critical Perspectives on Accounting*, 16 (2005) 717-748
- Muthahhari, Murtadha, 2009, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, Penerbit Mizan, Bandung.
- O'Donnell, Kevin, 2009, *Postmodernisme*, penerjemah Jan Riberu, penerbit Kanisius Yogyakarta.
- Pesqueux, Yvon, 2005, Corporate governance and accounting systems: a critical perspective, *Critical Perspectives on Accounting*, 16 (2005) 797-823
- PriceWaterhouse Coopers, 2000, *Prinsip-prinsip Penerapan Good Corporate Governance di BUMN*, Makalah pelatihan yang disampaikan di PT. Krakatau Steel pada tanggal 7 November 2000.
- Riduwan Akhmad, 2009, *Tafsir Sosial Laba Akuntansi: Kajian Semiotika Dekonstruktif dengan Filsafat Jacques Derrida*, Disertasi.
- Ritzer, George, 2003, *Teori Sosial Posmodern*, penerjemah Muhammad Taufik, penerbit Kreasi Wacana Yogyakarta.
- Rusdiyanto, J., 2002, Transformasi Organisasi: Sebuah Pemikiran Untuk "Better Corporate Governance" di Indonesia, *Konvensi III dan Forum Komunikasi Hasil Penelitian ITS dan Akademi Manajemen Indonesia*, Penerbit Guna Widya, Hal. 106-111.
- Sarup, Madan, 2008, *Panduan Pengantar Untuk Memahami Poststrukturalis dan Posmodernisme*, penerjemah Meghi Aginta Hidayat, Penerbit Jalasutra, Yogyakarta.
- Shihab, Quraish, 2007, *Wawasan Al Qur'an*, Penerbit Mizan, Bandung.
- Siauw Hong, 2005, *Rahasia Sukses Value Creation Adhi Karya*, Jakarta: Ray Indonesia.
- Sturrock, John, 2004, *Strukturalisme Post-strukturalisme: Dari Levi-Strauss sampai Derrida*, Penerjemah Muhammad Nahar, Penerbit Jawa Pos Press, Surabaya.
- Tim Corporate Governance BPKP, 2003, *Modul I GCG: Dasar-Dasar Corporate Governance*, Penerbit BPKP.
- Triyuwono, Iwan, 2003, Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Syari'ah, *IQTISAD Journal of Islamic Economics*, Vol. 4, No. 1, Muharram 1424 H/March, pp. 79 - 90